

# Hubungan Pengorganisasian dan Komponen Program Terhadap Tingkat Partisipasi KSM di Dalam PNPM Mandiri Perkotaan

Budi Sutrisno

Departemen Sosiologi, FISIP, Universitas Padjadjaran

Email: budi.sutrisno@unpad.ac.id

## Abstrak

*Artikel ini membahas mengenai partisipasi relawan didalam PNPM Mandiri Perkotaan. Partisipasi merupakan konsep sentral didalam pemberdayaan masyarakat yang dipandang sebagai proses dan tujuan (as means to ends). Tinggi rendahnya partisipasi masyarakat didalam pemberdayaan berimplikasi terhadap demokrasi dan implementasi HAM didalam program. Berdasarkan kajian literatur dan pemetaan teoretis diduga terdapat empat variabel dependen yang berhubungan dengan variabel independen tingkat partisipasi relawan didalam PNPM Mandiri Perkotaan. Keempat variabel dependen tersebut antara lain : Gaya Kepemimpinan Partisipatif KSM (X1), Peningkatan Kapasitas KSM (X2), Pendampingan KSM oleh Fasilitator (X3) dan Alokasi Pendanaan KSM (X4). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis serta derajat keeratan hubungan dari keempat variabel dependen (X1-X4) terhadap variabel independen (Y). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik penelitian survey serta didukung oleh wawancara. Sampel penelitian dipilih secara total dari populasi (total sampling) dari seluruh KSM Fisik yang ada di Kecamatan Pesanggrahan. Uji statistik menggunakan pearson correlation dengan terlebih dahulu dilakukan uji validitas, reliabilitas, normalitas, outlier dan linearitas. Hasil pengujian menunjukkan, hubungan variabel gaya kepemimpinan partisipatif KSM signifikan ( $sig = 0.035$ ) terhadap tingkat partisipasi dengan derajat keeratan Rendah (0.210). Variabel peningkatan kapasitas KSM signifikan ( $sig = 0.01$ ) terhadap tingkat partisipasi dengan derajat keeratan Rendah (0.314). Variabel pendampingan KSM oleh fasilitator signifikan ( $sig = 0.000$ ) terhadap tingkat partisipasi dengan derajat keeratan Tinggi (0.772). Sedangkan variabel alokasi pendanaan BLM tidak signifikan ( $sig = 0.157$ ) terhadap tingkat partisipasi dengan derajat keeratan Rendah (0.338). Hasil penelitian juga menunjukkan pentingnya struktur LKM sebagai bentuk pengorganisasian masyarakat, terhanggunya kapital sosial melalui proses rebug warga, adanya pemaknaan bersama (shared meaning) mengenai program diantara para relawan, tindakan komunikatif fasilitator didalam menterjemahkan pengetahuan teknis yang dibawa program serta peningkatan kapasitas relawan*

*melalui proses pembelajaran dan perencanaan anggaran deliberatif.*

Kata kunci: *pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, peningkatan kapasitas, proses pembelajaran*

## Abstract

*This article discusses the participation in the PNPM Mandiri Perkotaan. Participation is a central concept in the community development is seen as a process and a goal (as means to ends). The level of citizen participation in the development has implications for democracy and human rights in the program implementation. Based on a literature review and a theoretical mapping there were four dependent variables associated with the independent variable levels of voluntary participation in the PNPM Mandiri Perkotaan. The four dependent variables are : Participative Leadership Style of KSM (X1), KSM Capacity Building (X2), KSM Assistance by Facilitator (X3) and KSM Funding Allocation (X4). The purpose of this study was to test the hypothesis and the degree of relationship between the four dependent variables (X1-X4) to the independent variable (Y). This thesis uses quantitative methods, survey research techniques and supported by interviews. Samples were selected from the total population (total sampling) of all KSM Fisik in the Pesanggrahan District. Statistical test using pearson correlation with first tested the validity, reliability, normality, outliers, and linearity. The test results showed the relationship between KSM participative leadership style variable is significant ( $sig = 0.035$ ) to the level of KSM participation with degree of closeness low (0.210). Variable KSM Capacity Building significant ( $sig = 0.01$ ) to the level of participation with degree of closeness low (0.314). Variable KSM Assistance by Facilitator significant ( $sig = 0.000$ ) to the level of participation with a high degree of cohesion (0.772). While the BLM funding allocation variables were not significant ( $sig = 0.157$ ) to the level of participation with a low degree of closeness (0.338). The study also shows the importance of the structure of KSM as a form of community organizing, social capital through the establishment of citizen deliberation (rembug), shared meaning of the program among volunteers, facilitators communicative action in translating technical knowledge and volunteer capacity building through learning process had brought by program to volunteers and deliberative budget planning.*

Keywords: *community development, citizen participation, capacity building, learning process*

## PENDAHULUAN

Krisis ekonomi tahun 1997 telah meningkatkan proporsi penduduk miskin. Untuk mengatasinya pemerintah kemudian memprakarsai berbagai program baik yang bersifat bantuan sosial maupun pemberdayaan masyarakat. Tetapi didalam implementasinya program ini masih bersifat sektoral, regional, parsial serta tidak berkelanjutan sehingga efektivitasnya terutama didalam penanggulangan kemiskinan dipandang masih belum optimal. Pada tahun 1998, pemerintah kemudian meluncurkan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) untuk penanggulangan kemiskinan di daerah perdesaan dan tahun 1999 Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) untuk wilayah perkotaan.

PNPM Mandiri Perkotaan memiliki pandangan bahwa masyarakat adalah subjek aktif yang mampu mengenali, merumuskan serta menanggulangi berbagai permasalahan yang ada di wilayahnya. Partisipasi aktif serta kemandirian masyarakat kemudian menjadi fokus utama didalam pelaksanaan program. Oleh sebab itu, PNPM-MP lebih mengutamakan proses (*process*) dibandingkan capaian target (*outcome*) di dalam setiap tahapan siklusnya. Siklus ini merupakan rangkaian intervensi didalam PNPM-MP yang menitikberatkan penanganan kemiskinan melalui perbaikan kapital sosial dengan memunculkan kembali nilai-nilai moral seperti kejujuran, adil, ikhlas, tanpa pamrih di setiap tahapannya.

Upaya tersebut dilakukan melalui dua strategi yaitu : Pertama, melalui pengorganisasian masyarakat untuk memperkuat kepemimpinan serta meningkatkan kapasitas relawan. Kedua, melalui komponen program dalam bentuk pendampingan dan pengalokasian dana BLM. Komponen bantuan program diberikan dalam bentuk pendampingan oleh konsultan dan fasilitator profesional. Fasilitator bertugas memberikan pendampingan kepada masyarakat sejak awal tahapan siklus. Sedangkan komponen pendanaan yaitu Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) diberikan dalam bentuk *conditional transfer* yang bersifat stimulan dengan tujuan agar masyarakat bersedia dan mampu untuk berswadaya. Penggunaan dana BLM ini kemudian dimasukan kedalam tiga kelompok kegiatan yaitu fisik, sosial dan ekonomi (Tridaya).

Ketahanan (*endurance*) serta keberlanjutan (*sustainability*) warga untuk ikut berpartisipasi didalam program PNPM dalam jangka waktu yang lama menjadi perhatian utama karena akan mempengaruhi keberhasilan program pemberdayaan secara keseluruhan. Hal ini yang kemudian menjadi permasalahan didalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan terutama di Provinsi DKI Jakarta. Dengan tipologi dan karakteristik warga perkotaan yang sangat heterogen tentunya menjadi tidak mudah untuk mendorong partisipasi warga DKI terutama dari segi

kuantitas dan intensitas.

Berdasarkan hasil pemetaan KMW DKI Jakarta-Banten, khusus untuk propinsi DKI Jakarta keberadaan dan kondisi BKM telah banyak yang tidak operasional. Pada saat awal terbentuknya terdapat 201 BKM tetapi sampai tahun 2007 hanya tersisa 77 BKM (38%) yang masih aktif mengelola dana bergulir dan hanya 64 BKM (31%) yang kinerja kelembagaannya tergolong baik dan cukup. Sedangkan untuk kegiatan utama yang masih berjalan hanya pengguliran dana bidang ekonomi dan itupun kurang menyentuh sasaran kaum miskin. Secara ringkas berdasarkan profil BKM yang tersusun diperoleh informasi tentang status BKM di seluruh DKI Jakarta.

Tabel 1 Jumlah dan Status BKM P2KP yang Masih Operasional

Kota	Jumlah BKM	BKM yang masih mengelola Dana bergulir	Status BKM berdasarkan kinerja kelembagaan		
			Baik	Cukup	Kurang
Jakarta Barat	46	21	1	15	30
Jakarta Pusat	33	7	2	5	26
Jakarta Selatan	40	17	1	16	23
Jakarta Timur	55	19	0	10	45
Jakarta Utara	27	13	2	12	13
<b>Jumlah</b>	<b>201</b>	<b>77</b>	<b>6</b>	<b>58</b>	<b>137</b>

Sumber : Hasil pemetaan sosial KMW DKI-Banten, 2007

## **TUJUAN PENELITIAN**

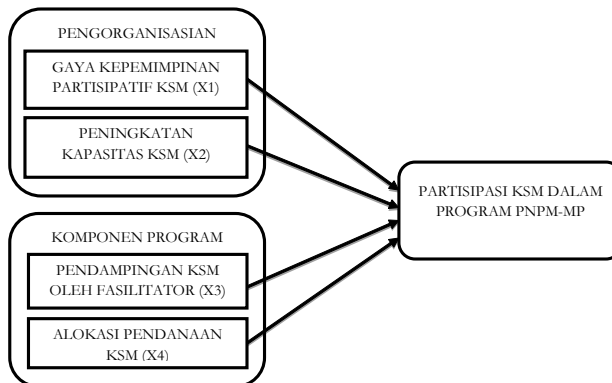
Tujuan dari penelitian ini untuk menguji hubungan diantara keempat variabel yaitu gaya kepemimpinan KSM, peningkatan kapasitas KSM, pendampingan KSM oleh fasilitator dan alokasi pendanaan KSM terhadap tingkat partisipasi KSM didalam program pemberdayaan masyarakat PNPB Mandiri Perkotaan. Hubungan diantara keempat variabel dependen terhadap variabel independen tersebut digambarkan dalam sebuah model hipotesis.

## HIPOTESIS

Terdapat empat hipotesa yang akan dibuktikan didalam penelitian ini. Hipotesa tersebut dikembangkan berdasarkan pemetaan teori dan studi literatur terhadap penelitian terdahulu mengenai pemberdayaan masyarakat khususnya program PNPM Mandiri Perkotaan. Keempat hipotesis yang akan diuji tersebut yaitu :

1. Hipotesis 1 : Terdapat hubungan yang signifikan antara gaya kepemimpinan partisipatif KSM dengan tingkat partisipasi KSM didalam program PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan
2. Hipotesis 2 : Terdapat hubungan yang signifikan antara peningkatan kapasitas KSM dengan tingkat partisipasi KSM didalam program PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan
3. Hipotesis 3 : Terdapat hubungan yang signifikan antara pendampingan KSM oleh fasilitator dengan tingkat partisipasi KSM didalam program PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan
4. Hipotesis 4 : Terdapat hubungan yang signifikan antara alokasi pendanaan KSM dengan tingkat partisipasi KSM didalam program PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan

Secara lebih jelas, keempat hipotesis penelitian tersebut kemudian digambarkan dalam bentuk model sebagai berikut :



## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menekankan hubungan diantara dua variabel. Sedangkan teknik penelitian yang digunakan adalah survey. Sementara untuk memperjelas hasil uji statistik diantara dua variabel tersebut, maka dilakukan wawancara terhadap informan yang ditentukan secara *purposive*. Informan didalam penelitian ini adalah relawan yang telah mengikuti kegiatan PNPM-MP sejak dari tahap awal siklus serta aktif di kegiatan kemasyarakatan. Sampel didalam penelitian ini dipilih secara total dari populasi (*total sampling*) dari seluruh KSM Fisik yang ada di Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan. Terdapat 19 KSM Fisik di Kecamatan Pesanggrahan dengan jumlah anggota sebanyak 121 orang. Sampling diambil dari keseluruhan anggota setelah dikurangi koordinator sehingga jumlah sampel menjadi 102 orang.

Instrumen yang digunakan didalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup (*closed questionnaire*) dengan menggunakan skala likert. Skala pengukuran yang digunakan untuk setiap variabel adalah Ordinal yang kemudian dianggap Interval. Hal ini mengacu kepada pendapat Bryman & Cramer (2001) dimana variabel yang secara tegas dianggap ordinal tetapi memiliki banyak kategori misalnya kuesioner dengan banyak pertanyaan (*multiple item*), maka variabel ini dianggap memiliki properti yang sama dengan variabel interval yang sejati.

Sebelum digunakan untuk mengumpulkan, menganalisa data serta menguji hipotesis, instrumen yang digunakan terlebih dahulu di uji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas dan reliabilitas tersebut dilakukan terhadap populasi yang memiliki persamaan karakteristik dengan populasi yang akan diteliti yaitu di anggota KSM di Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama. Didalam penelitian ini jenis validitas yang digunakan adalah validitas konstruk (*construct validity*) dengan analisa perhitungan menggunakan rumus korelasi "*pearson product moment*".

$$r_{xy} = \frac{n \sum X_i Y - (\sum X_i)(\sum Y)}{\sqrt{\{n(X_i^2) - (\sum X_i)^2\} - n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2}}$$

Sedangkan uji reliabilitas menggunakan *Cronbach's Alpha* dimana koefisien korelasi menunjukkan nilai 0.8 atau lebih maka instrumen dianggap reliabel (Bryman & Cramer, 2001:63). Berdasarkan hasil uji reliabilitas terhadap 62 butir item pernyataan dengan menggunakan

Cronbach's Alpha didapatkan nilai 0.917. Dikarenakan nilai Alpha 0.917 lebih besar dari 0.8, maka kesimpulannya seluruh item pertanyaan didalam instrumen reliabel.

Analisa data didalam penelitian ini menggunakan uji statistik *bivariat* dengan bantuan software SPSS v20. Analisis hubungan diantara dua variabel menggunakan uji korelasi *Pearson's Product Moment*. Dengan menggunakan uji korelasi *Pearson's r* tersebut maka dapat diketahui kekuatan serta arah hubungan diantara kedua variabel tersebut. Pedoman untuk mengukur derajat keeratan diantara dua variabel yang diuji bersumber dari Cohen dan Holliday (1982 dalam Bryman and Duncan 2001, 174) dimana derajat keeratan :

- 0.9-1.00 baik positif maupun negatif menunjukkan derajat hubungan yang sangat tinggi;
- 0.7-0.89 baik positif maupun negatif menunjukkan derajat hubungan yang tinggi;
- 0.4-0.69 baik positif maupun negatif menunjukkan derajat hubungan sedang;
- 0.2-0.39 baik positif maupun negatif menunjukkan derajat hubungan yang rendah;
- < 0.19 baik positif maupun negatif menunjukkan derajat hubungan yang sangat rendah.

Uji persyaratan data didalam penelitian ini meliputi uji normalitas yang dilakukan secara visual dengan menggunakan grafik Q-Q Plot untuk masing-masing variabel. Selain uji normalitas, juga dilakukan pengecekan terhadap kemungkinan adanya data yang bersifat *outlier* yaitu data yang terletak jauh di luar sebaran data normal. Pengujian terhadap data *outlier* dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melihat besaran ZScore dan menggunakan visualisasi Box Plot. Apabila nilai ZScore lebih besar dari angka +2,5 atau lebih kecil dari -2,5 maka data tersebut *outlier*. Linearitas data baik positif maupun negatif secara visual dapat diuji dengan menggunakan *scatter plot* yang diberikan tambahan garis regresi (Santoso 2002).

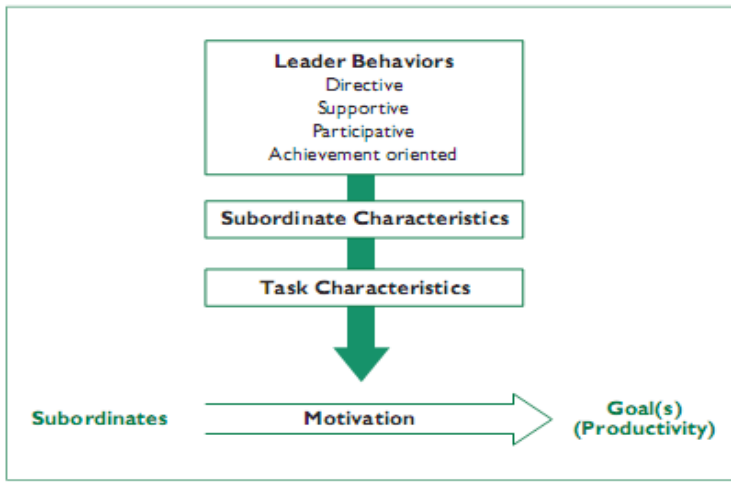
## KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF

Weber mengidentifikasi kepemimpinan berdasarkan wewenang (*authority*) yang dimiliki yaitu legal-rasional, tradisional dan kharismatik yang kemudian memunculkan tiga jenis kepemimpinan yaitu : tradisional, birokratik dan kharismatik. Kepemimpinan birokratik menggunakan kontrol dengan dasar ilmu pengetahuan, kekuasaan yang bersifat hirarkis dan legal rasional. Kepemimpinan tradisional kekuasaan melekat pada loyalitas, favoritisme dan politik. Sedangkan kepemimpinan kharismatik

mendasarkan kepada kepribadian individu yang tidak biasa, memiliki kekuatan supernatural dan karisma (Ritzer 2008)

Terdapat tiga teori utama mengenai kepemimpinan yang terus berkembang dan mengalami penyempurnaan yaitu teori kecocokan (*contingency theory*), teori alur-tujuan (*path-goal theory*), teori pertukaran pemimpin-pengikut (*leader-member exchange theory*) (Northouse 2012; Haus, Heinelt dan Stewart 2005). Dari ketiga teori kepemimpinan tersebut, teori alur tujuan kemudian menjadi fokus didalam penelitian ini. Terdapat beberapa komponen didalam teori alur-tujuan diantaranya perilaku pemimpin, karakteristik pengikut, karakteristik tugas dan motivasi. Dari berbagai komponen tersebut perilaku pemimpin kemudian sangat mempengaruhi gaya kepemimpinan yang digunakan. Northouse (2012, 140) menguraikan keempat perilaku pemimpin yang menjadi fokus didalam teori alur-tujuan, yaitu : 1) Mengarahkan (*directive*), 2) Memberi dukungan (*supportive*), 3) Partisipatif (*participative*), 4) Kepemimpinan berorientasi prestasi (*achievement-oriented leadership*)

Figure 7.2 Major Components of Path-Goal Theory



Gambar 1 Komponen Utama didalam Teori Alur-Tujuan

Sumber : Northouse (2012:139)



## **PENINGKATAN KAPASITAS (*CAPACITY BUILDING*)**

Kemampuan masyarakat (*community capacity*) secara harfiah diterjemahkan sebagai kemampuan untuk “bekerja” sehingga masyarakat dapat berfungsi dengan baik. Chaszin et.al (2001, 7) mendefinisikan kapasitas masyarakat sebagai interaksi antara kapital manusia (*human capital*), sumber daya organisasi dan kapital sosial yang ada didalamnya sehingga dapat dipergunakan untuk memecahkan permasalahan serta meningkatkan kesejahteraan bersama. Kemampuan ini dapat dikembangkan melalui proses sosial informal dan/atau diorganisasikan melalui individu, organisasi dan jejaring sosial yang ada diantara mereka dan antara mereka dengan sistem yang lebih besar dimana masyarakat merupakan bagian didalamnya. Peningkatan kapasitas didalam pemberdayaan masyarakat juga harus dilakukan pada tataran kelembagaan dan individu. Garlick dalam McGinty (2003) menyebutkan lima elemen utama didalam pengembangan kapasitas, yaitu :

- 1) Meningkatkan pengetahuan meliputi upaya peningkatan keterampilan, penelitian serta memberikan bantuan pembelajaran;
- 2) Mengembangkan kepemimpinan komunitas dalam bentuk organisasi;
- 3) Membangun jejaring dalam bentuk kerjasama dan aliansi;
- 4) Memberikan penghargaan terhadap masyarakat dan mengajak mereka untuk bersama-sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
- 5) Dukungan informasi meliputi kemampuan untuk mengumpulkan, mengakses serta mengelola informasi yang dipandang bermanfaat.

Soetomo (2011) menyatakan bahwa peningkatan kapasitas merupakan upaya yang berorientasi proses bukan hasil. Proses yang dimaksud adalah proses belajar atau lebih tepatnya bekerja sambil belajar (*learning by doing*). Melalui proses tersebut maka akan muncul berbagai gagasan kreatif yang bersumber pada pengetahuan lokal.

## **PENDAMPINGAN**

Pendampingan adalah suatu hubungan antara pendamping dengan yang didampingi dimana keduanya berada dalam posisi yang dekat. Menurut Ife (2002, 201) pendampingan adalah suatu pekerjaan yang menuntut untuk dapat melakukan beragam kegiatan dan peranan yang dibutuhkan secara simultan. Midgley (1995) menyatakan bahwa

didalam pemberdayaan masyarakat pada umumnya digunakan tenaga profesional terlatih yang berasal dari luar masyarakat tersebut. Mereka kemudian berkewajiban untuk melatih tenaga pendamping lokal yaitu para kader/relawan dalam rangka mengaktifkan partisipasi di tingkat lokal.

Pendamping memiliki peranan penting didalam memunculkan serta meningkatkan kesadaran masyarakat didalam memahami penyebab masalah berikut alternatif pemecahannya. Pendampingan ini menjadi sangat penting karena melibatkan niat dan kemauan dari dalam diri partisipan yang didampingi untuk mencoba merubah perilakunya. Ife (2002, 201-210) menjelaskan berbagai peranan tersebut, antara lain : 1) Peran Fasilitatif yang terdiri dari animasi sosial, mediasi dan negosiasi, pemberi dukungan, membentuk konsensus, fasilitasi kelompok, pemanfaatan sumberdaya dan keterampilan, mengorganisasikan, 2) Peran Edukatif yaitu membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, mengkonfrontasikan dan memberikan pembelajaran melalui berbagai pelatihan; 3) Peran Perwakilan meliputi pencarian sumberdaya, advokasi, penggunaan media, hubungan masyarakat menciptakan jejaring, berbagi pikiran dan 4) Peran Teknis dimana pendamping dituntut tidak hanya mampu mengorganisir kelompok tetapi juga mampu melaksanakan tugas teknis seperti pengumpulan dan analisa data, menggunakan komputer, kemampuan presentasi verbal maupun tertulis serta kemampuan dalam manajemen maupun pengendalian keuangan.

## **BANTUAN PENDANAAN**

Seluruh program pemberdayaan masyarakat pasti memerlukan bantuan (*aid*) terutama pada tahap awal pembentukan. Dudley (2003) membagi bantuan kedalam dua jenis yaitu bantuan materil dan teknis. Bantuan materi biasanya dalam bentuk pendanaan uang yang diberikan oleh pihak luar kepada masyarakat. Sedangkan bantuan teknis diberikan dalam bentuk keterampilan dan teknologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Seluruh program pengorganisasian masyarakat membutuhkan pendanaan kecuali yang bersifat informal dan berskala kecil. Untuk membangun sebuah organisasi kemasyarakatan membutuhkan pendanaan untuk membayar staf, sewa kantor, telepon, komputer dan lainnya.

## PEMBAHASAN

### Hasil Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil uji bivariat dengan menggunakan korelasi pearson (*pearson-r*) antara variabel Gaya Kepemimpinan Partisipatif (X1), Peningkatan Kapasitas KSM (X2), Pendampingan KSM oleh Fasilitator (X3) dan Alokasi Pendanaan KSM (X4) dengan variabel Tingkat Partisipasi KSM (Y) diperoleh hasil sebagai berikut :

- Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan Partisipatif KSM dengan Tingkat Partisipasi KSM

Pengujian statistik antara kedua variabel tersebut menunjukkan adanya korelasi positif dan signifikan antara variabel gaya kepemimpinan partisipatif KSM dan tingkat partisipasi KSM. Nilai signifikansi hasil pengujian adalah 0.035 dan apabila dibandingkan dengan pedoman ( $\text{sig} < \alpha (0.05)$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Jadi kesimpulan untuk hipotesis pertama *“Ada hubungan yang signifikan antara variabel Gaya Kepemimpinan Partisipatif KSM dengan Tingkat Partisipasi KSM”*. Derajat keeratan (*correlation*) antara variabel gaya kepemimpinan partisipatif KSM dan tingkat partisipasi KSM sebesar 0.210 yaitu dikategorikan Rendah.

- Hubungan antara Peningkatan Kapasitas KSM dengan Tingkat Partisipasi KSM

Pengujian statistik antara kedua variabel tersebut menunjukkan adanya korelasi yang positif dan signifikan antara variabel peningkatan kapasitas KSM dan tingkat partisipasi KSM. Nilai signifikansi hasil pengujian adalah 0.01 dan apabila dibandingkan dengan pedoman ( $\text{sig} < \alpha (0.05)$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Jadi kesimpulan untuk hipotesis kedua *“Ada hubungan yang signifikan antara variabel Peningkatan Kapasitas KSM dengan Tingkat Partisipasi KSM”*. Derajat keeratan antara variabel peningkatan kapasitas KSM dan tingkat partisipasi KSM sebesar 0.314 yaitu dikategorikan Rendah.

- Hubungan antara Pendampingan KSM oleh Fasilitator dengan

### Tingkat Partisipasi KSM

Pengujian statistik antara kedua variabel tersebut menunjukkan adanya korelasi yang positif dan signifikan antara variabel pendampingan KSM oleh Fasilitator dan tingkat partisipasi KSM. Nilai signifikansi hasil pengujian adalah 0.000 dan apabila dibandingkan dengan pedoman ( $\text{sig} < \alpha (0.05)$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Jadi kesimpulan untuk hipotesis ketiga “*Ada hubungan yang signifikan antara variabel pendampingan KSM oleh Fasilitator dengan Tingkat Partisipasi KSM*”. Derajat keeratan antara variabel pendampingan KSM oleh fasilitator dengan tingkat partisipasi KSM sebesar 0.772 yaitu dikategorikan Tinggi.

- Hubungan antara Alokasi Pendanaan KSM dengan Tingkat Partisipasi KSM

Pengujian statistik antara kedua variabel tersebut menunjukkan tidak adanya korelasi yang positif dan signifikan antara variabel alokasi pendanaan KSM dan tingkat partisipasi KSM. Nilai signifikansi hasil pengujian adalah 0.157 dan apabila dibandingkan dengan pedoman ( $\text{sig} > \alpha (0.05)$ ), maka dengan demikian  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Jadi kesimpulan untuk hipotesis keempat adalah “*Tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel alokasi pendanaan KSM dengan Tingkat Partisipasi KSM*”. Derajat keeratan antara variabel Alokasi Pendanaan KSM dengan Tingkat Partisipasi KSM sebesar 0.338 yaitu dikategorikan Rendah.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses pendidikan yang memungkinkan masyarakat mengatasi masalah melalui keputusan kelompok. Pemberdayaan berupaya untuk memperkuat “masyarakat” beserta ikatan sosial dan psikologis yang ada didalamnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dalam praktiknya dapat dipandang sebagai sebuah proses (*process*) dan hasil (*outcome*). Sebagai sebuah proses, pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan bertindak secara kolektif. Sedangkan sebagai sebuah hasil (*outcome*), pemberdayaan masyarakat dilihat sebagai kemampuan untuk bertindak kolektif dan hasilnya adalah adanya tindakan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang

baik fisik, lingkungan, budaya, sosial, politik, ekonomi, dll.

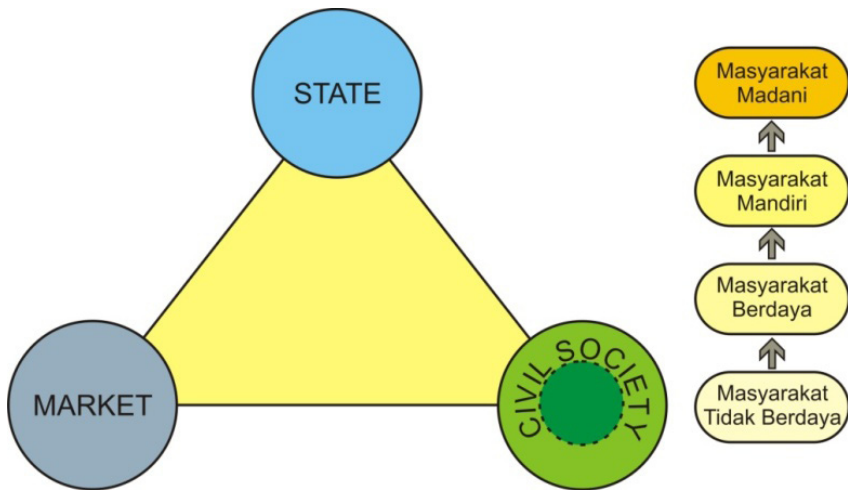
Hubungan sosial menjadi sangat penting didalam membangun solidaritas dan menyukseskan pelaksanaan kegiatan didalam pemberdayaan masyarakat. Pertemanan, rasa percaya, dan kesediaan untuk berbagi sumberdaya menjadi bagian integral didalam tindakan kolektif. Ilmuwan sosial melihat hubungan ini sebagai bentuk kapital yaitu kapital sosial. Kapital sosial adalah seperangkat sumberdaya intrinsik didalam hubungan sosial mencakup rasa percaya (*trust*), norma (*norms*) dan jejaring (*networks*) (Putnam, 1993). Kapital sosial juga seringkali dikaitkan dengan rasa percaya terhadap institusi pemerintahan, keterlibatan warga negara, keberdayaan didalam pembangunan ekonomi serta kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat secara umum.

### **Kepemimpinan Partisipatif KSM**

PNPM-MP memandang praktik pembangunan pada masa lalu telah menyebabkan fragmentasi dan rusaknya kapital sosial yang ada di masyarakat. Dampak turunan yang ditimbulkan adalah munculnya rasa curiga dan ketidakpercayaan (*distrust*) terhadap institusi pemegang kebijakan baik di tingkat atas sampai bawah. Menghadapi realitas tersebut, PNPM-MP kemudian membentuk organisasi baru yaitu Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) di tingkat kelurahan sebagai wadah perjuangan bagi para relawan dan warga miskin didalam pembangunan di wilayahnya. Setelah LKM terbentuk, kemudian disusul dengan pembentukan Tim Pengendali Program di tingkat RW (TPP-RW) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

LKM, TPP-RW, KSM –selanjutnya disebut organisasi masyarakat warga (OMW) PNPM-MP– merupakan lembaga yang dibentuk oleh warga secara demokratis tanpa melalui mekanisme pencalonan dan/ataupun penunjukan. Melalui mekanisme tersebut di kelurahan kemudian terbentuk organisasi baru yang dipilih langsung oleh warga tanpa ada campur tangan dan keterlibatan unsur pemerintah. Hal ini kemudian menjadikan keberadaan organisasi PNPM-MP bersifat sejajar dengan institusi negara. Pola hubungan yang terbentuk juga kemudian bersifat koordinatif dimana pemerintah tidak dapat mengintervensi program dan keputusan organisasi PNPM-MP. Dengan kata lain, organisasi PNPM-MP tidak menjadi subordinat dari institusi

negara baik di tingkat kelurahan, kecamatan maupun kota. Hal ini untuk kembali memunculkan keseimbangan kekuasaan (*balance of power*) antara komponen masyarakat sipil –dalam hal ini warga yang terlibat didalam organisasi PNPM-MP— dengan institusi negara. Hal ini sebenarnya terkait dengan tujuan akhir (*the ultimate goal*) dari program PNPM adalah menciptakan Masyarakat Madani atau dalam istilah barat Masyarakat Sipil (*civil society*) yang kuat dan mampu berdiri sejajar dengan Negara dan pasar.



Gambar 2 Tujuan PNPM-MP Untuk Memperkuat Komponen Masyarakat Sipil

Sumber : Olahan penelitian, 2013

Berdasarkan hasil penelitian, variabel gaya kepemimpinan partisipatif KSM signifikan terhadap tingkat partisipasi dengan derajat keeratan diantara kedua variabel tersebut rendah. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan KSM beserta koordinatornya menjadi penting sebagai salah satu syarat keikutsertaan didalam program karena PNPM-MP adalah program pemberdayaan masyarakat yang mendasarkan seluruh kegiatannya kepada kelompok (*group based*). Tetapi persyaratan pembentukan dan pemilihan koordinator KSM yang harus partisipatif sepertinya belum begitu dimaknai oleh para relawan.

Dalam konteks PNPM-MP, baik para relawan maupun *beneficiaries* terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan, ekonomi, pekerjaan maupun kelas sosial. Dengan kondisi seperti ini maka karakteristik pengikut menjadi heterogen ditambah dengan seting lingkungan perkotaan yang kompleks. Selain itu, banyak diantara para relawan yang belum memahami program secara utuh, terutama pada tahap awal siklus. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan partisipatif tidak sepenuhnya efektif untuk diterapkan. Hendaknya program juga menekankan tiga perilaku kepemimpinan lainnya yaitu mengarahkan (*directive*), memberikan dukungan (*supportive*) serta berorientasi prestasi (*achievement oriented*) dan kemudian menerapkan keempat perilaku kepemimpinan tersebut secara simultan dan bersifat situasional. Pada tahap awal program, koordinator sebaiknya menerapkan kepemimpinan yang bersifat mengarahkan dan memberikan dukungan. Setelah relawan/ anggota dipandang mampu baru diterapkan kepemimpinan partisipatif dan berorientasi prestasi. Dengan demikian tingkat partisipasi diharapkan akan semakin meningkat.

### **Peningkatan Kapasitas KSM**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat bergabung didalam program karena diawali rasa keingintahuan (*curiosity*) walaupun pada akhirnya ada yang memutuskan untuk terus mengikuti atau tidak mengikuti program. Oleh karena itu, agar dapat berjalan dengan baik maka perlu ada penyamaan persepsi terhadap program baik proses maupun tahapan kegiatannya. Peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan menjadi penting untuk menanamkan kesamaan persepsi baik antara pembawa program dengan relawan, relawan dengan relawan dan kemudian membangun solidaritas diantara mereka. Jika sebuah program pemberdayaan masyarakat bermaksud hendak membangun atau memperkuat solidaritas, maka konsultan & fasilitator harus memberikan perhatian terhadap pemaknaan bersama (*shared meaning*) yang meliputi tempat, peristiwa dan hubungan dengan individu lainnya. Interaksionisme simbolik sangat penting didalam pemberdayaan masyarakat karena mampu memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana individu mengembangkan pemaknaan bersama (*shared meaning*) yang merupakan komponen penting bagi terciptanya solidaritas.

Didalam PNPM-MP, upaya membangun kapasitas dilakukan dengan cara memberikan pelatihan dan *on the job training* kepada para relawan. Didalam pelatihan tersebut, pihak konsultan memberikan materi-materi terkait filsafat program dengan menggunakan metode pembelajaran orang dewasa (*andragogy*). Dimulai dari pemaknaan bersama terhadap kemiskinan, pemaknaan terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya serta kemudian mendorong munculnya kesamaan pandangan mengenai berbagai perubahan yang perlu dilakukan agar masyarakat menjadi lebih baik (*community improvement*). Sedangkan *on the job training* memberikan kesamaan pandangan dan pemahaman mengenai teknis pelaksanaan program berikut istilah, jargon dan simbol yang digunakan.

Variabel peningkatan kapasitas signifikan terhadap partisipasi anggota KSM. Hal ini disebabkan peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan dan bimbingan yang diberikan oleh program dan fasilitator dirasakan sangat penting oleh relawan. Sedangkan derajat hubungan yang rendah disebabkan program belum mampu secara maksimal menciptakan *bridging* dan *linking* dengan pihak luar. Selain itu, peningkatan kapasitas masih dominan diberikan kepada struktural LKM dan belum begitu menyentuh KSM.

### **Pendampingan KSM oleh Fasilitator**

Keberadaan fasilitator didalam program pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu variabel penting didalam meningkatkan partisipasi. Keberadaan fasilitator selain untuk memberikan pemahaman dan peningkatan kapasitas juga berperan didalam memperbaiki dan/atau menciptakan ikatan-ikatan sosial di masyarakat. Melalui proses rembug warga di setiap tahapan siklus terjadi interaksi yang kembali memperkuat hubungan sosial diantara warga. Fasilitator juga menjadi sarana penting didalam mentransfer pengetahuan dari program kepada relawan. Apabila dipandang melalui teori tindakan komunikatif Habermas, fasilitator sangat berperan didalam melakukan sintesa antara pengetahuan teknokratik dengan “suara” masyarakat di tingkat lokal. Pengetahuan teknis yang dibawa program cenderung sulit untuk dipahami oleh masyarakat terutama masyarakat kelas bawah.



Pengetahuan teknis yang berasal dari disiplin ilmu perencanaan dan teknik sipil serta ekonomi kemudian seringkali mendominasi program.

Berkaitan dengan program pemberdayaan PNPM-MP, keberadaan fasilitator baik sosial, ekonomi maupun teknik menjadi semacam penterjemah (*translator*) pengetahuan teknis yang diberikan oleh program agar dapat dipahami oleh para relawan baik dari kelas atas, menengah maupun bawah. Dan untuk mempercepat proses translasi tersebut diperlukan komunikasi yang intens antara fasilitator dengan para relawan. Didalam penelitian ini, variabel pendampingan oleh fasilitator signifikan terhadap tingkat partisipasi relawan dengan derajat keeratan yang kuat. Pendampingan oleh faskel dianggap penting oleh seluruh informan karena selama ini mereka yang memberikan bimbingan serta transfer pengetahuan kepada para relawan baik di tingkat LKM, TPP-RW maupun KSM. Selain itu, keberadaan faskel juga memunculkan antusiasme warga yang semula ragu-ragu kemudian menjadi yakin untuk terus mengikuti program karena merasa dibimbing dan diberi informasi. Para informan juga merasa keberatan jika keberadaan faskel dirotasi atau ditarik oleh konsultan karena pengetahuan yang ditransfer belum sepenuhnya dipahami masyarakat.

Berdasarkan teori tindakan komunikatif Habermas, fasilitator harus mampu mempertemukan serta memadukan pengetahuan teknokratik, ekonomi dan sosial yang dibawa program dengan pengetahuan dan praktik di tingkat lokal. Dengan demikian tidak terjadi dominasi oleh kekuatan “luar” sehingga warga aktif terlibat dan mengemukakan pendapatnya tanpa ada tekanan.

### **Alokasi Pendanaan KSM**

Hasil pengujian variabel terakhir yaitu alokasi pendanaan BLM menunjukkan tidak signifikan terhadap tingkat partisipasi dengan derajat keeratan yang juga rendah. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan menyatakan akan tetap melanjutkan program meskipun dana BLM dihentikan. Hal ini disebabkan pembangunan di wilayah akan lambat apabila hanya mengandalkan dana BLM. Meskipun faktanya seluruh informan menyatakan bahwa dana BLM penting sebagai dana stimulan

agar warga mau ikut serta didalam kegiatan. Penyebab tidak signifikannya hubungan kemungkinan disebabkan kecilnya dana BLM yang diterima, terdapatnya jeda yang cukup panjang akibat ketidakpastian pencairan sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan bersifat insidental.

Didalam PNPMP-MP relawan yang terlibat baik di tingkatan struktural maupun *beneficiaries* sama sekali tidak mendapatkan upah (*non salaried*). Satu-satunya sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk kepentingan organisasi adalah dana BOP (biaya operasional) sebesar 5% dari total dana BLM yang diterima. Tentunya dengan mempertimbangkan keberadaan para relawan sebagai individu yang memiliki kebutuhan hidup, maka sesuai dengan teori pilihan rasional, tidak adanya imbalan yang sepadan terhadap kinerja yang telah mereka lakukan lambat laun akan mempengaruhi tingkat partisipasi.

Program juga telah menerapkan konsep demokrasi deliberatif dimana keputusan selalu diambil berdasarkan hasil rembug yang bersifat bebas dan setara diantara para relawan. Pengambilan keputusan kolektif tersebut bukan hanya dalam perencanaan kegiatan tetapi juga penyusunan alokasi anggaran. Perencanaan kegiatan beserta alokasi anggaran yang dibutuhkan sepenuhnya dilakukan oleh warga tanpa intervensi dari pihak manapun yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis). Perencanaan tersebut disusun untuk jangka waktu 1-3 tahun.

Tetapi terdapat paradok dimana penentuan prioritas kegiatan dan perhitungan besarnya anggaran yang dibutuhkan telah dilakukan oleh warga tetapi pada realisasinya alokasi dana BLM yang diterima dari pemerintah bersifat tetap (*fixed*) berdasarkan jumlah KK miskin yang ada di suatu Kelurahan. Berdasarkan informasi dari tim Konsultan Manajemen Pusat kesulitan terjadi karena BLM bersumber dari uang pinjaman yang berbunga lunak, jadi terlebih dahulu harus direncanakan kemudian baru diusulkan. Dampaknya perencanaan kegiatan hanya bisa dihitung dengan skala kecil, sedang dan besar. Dalam hal ini terdapat hambatan struktural didalam pemerintahan sendiri. Praktik demokrasi deliberatif didalam program PNPMP-MP dapat sepenuhnya dilakukan apabila alokasi BLM bersumber dari dana hibah.

## KESIMPULAN

Secara struktural telah terjadi pergeseran kekuasaan (*power shifting*) dari negara ke masyarakat. Wewenang dan dan peran negara didalam perencanaan pembangunan (wilayah) sebagian mulai diberikan kepada masyarakat sipil. Konsekwensinya kemudian tercipta hubungan kekuasaan (*power relation*) yang baru antara masyarakat sipil dan negara dalam konteks reformasi dan otonomi daerah. Pengorganisasian masyarakat dalam bentuk OMW (LKM, TPP-RW dan KSM) dapat dipandang sebagai embrio bagi terciptanya komponen masyarakat sipil di Indonesia.

Terjadi pergeseran kultur (nilai) terhadap peran serta kaum perempuan didalam program. Kehadiran dan keterlibatan kaum perempuan di ranah publik dipandang semakin penting. Hasil penelitian ini menunjukkan keterlibatan kaum perempuan didalam struktur KSM mencapai 34,7%. Studi kasus di RW.02, kelurahan Petukangan Utara menunjukkan relawan perempuan mampu menjadi motor pembangunan di wilayah dengan melibatkan warga dari semua lapisan sosial.

Kepemimpinan yang dikembangkan di PNPM bersifat demokratis dan berdasarkan nilai-nilai moral (kepemimpinan moral) seperti kejujuran, keikhlasan, adil, dll. Kepemimpinan yang dibangun bersifat prosedural dimana warga biasa dapat muncul menjadi pemimpin selama memenuhi kriteria dan mendapatkan dukungan penuh dari warga.

Peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan menjadi penting untuk menanamkan kesamaan persepsi baik antara pembawa program dengan relawan dan kemudian membangun solidaritas diantara mereka dengan menciptakan pemaknaan bersama (*shared meaning*) terhadap kemiskinan, pemaknaan bersama terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya serta kemudian mendorong munculnya kesamaan pandangan mengenai berbagai perubahan yang perlu dilakukan agar masyarakat menjadi lebih baik (*community improvement*).

Pendampingan sangat penting untuk menterjemahkan (*translator*) pengetahuan teknis yang diberikan oleh program agar dapat dipahami oleh para relawan dari semua lapisan masyarakat. Fasilitator kemudian mempertemukan serta memadukan pengetahuan teknokratik, ekonomi dan sosial yang dibawa

program dengan pengetahuan dan praktik di tingkat lokal. Aspek pembelajaran di setiap tahapan kegiatan menjadi hal yang sangat penting dalam rangka peningkatan kapasitas relawan. Selain itu, tidak terjadi dominasi oleh kekuatan “luar” sehingga warga aktif terlibat dan mengemukakan pendapatnya tanpa ada tekanan.

Proses penganggaran ditingkat OMW telah bersifat deliberatif dimana warga memiliki kewenangan penuh didalam menentukan jenis kegiatan di wilayah berdasarkan identifikasi RK dan Pemetaan Swadaya (*bottom-up*). Tetapi pengalokasian anggaran masih bersifat *top-down* karena disebabkan adanya hambatan struktural di tingkatan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_.2007.*Petunjuk Teknis PNPB Mandiri-P2KP 2007 Untuk Propinsi DKI Jakarta*: Dirjen Cipta Karya
- Bryman, Alan, and Duncan Cramer.2001. *Quantitative Data Analysis with SPSS Release 10 for Windows A guide for social scientists*.USA:Routledge
- Chaslzin, Robert J, et.al.2001. *Building Community Capacity*.New York: Aldine De Gruyter
- Dudley, Eric.1993.*The Critical Villager Beyond Community Participation*.New York:Routledge
- Haus, Michael, et.al.2005.*Urban Governance and Democracy Leadership and Community Involvement*.New York:Routledge
- Ife, Jim.2002.*Community Development: Community Based Alternatives in a Age of Globalization*.Australia:Longman
- McGinty, Sue, and Garlick.2003.*The Literature and Theories Behind Community Capacity Building, In: Sharing Success: An Indigenous Perspective*.VIC, Australia:Common Ground Publishing, pp. 65-93.
- Midgley, James.1995.*Social Development:The Development Perspective in Social Welfare*.London:Sage Publication
- Northouse, Peter G.2012.*Leadership Theory and Practice 6th Edition*. London:Sage Publication
- Putnam, Robert D.1993.*Making Democracy Work Civic Traditions in Modern Italy*.New Jersey:Princeton University Press
- Ritzer, George.2008.*Classical Sociological Theory 5<sup>th</sup> edition*.New York:McGraw-Hill
- Santoso, Singgih.2002.*Buku Latihan SPSS Statistik Multivariat*.Jakarta:PT. Elex Media Komputindo
- Soetomo.2011. *Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Antitesisnya?* . Yogyakarta:Pustaka Pelajar